

PENINGKATAN MANAJEMEN PUBLIK BERBASIS TECHNOLOGY MENUJU *GOOD GOVERNMENT*

Kiki Aprilia Tiningsih^a, Vrega Kristian Ekananda^b

^{a,b}Universitas Jember

^akikiapriliatiningsih@gmail.com

^bvrega.kristian.ekananda@gmail.com

Abstrak

Pada era globalisasi ini, teknologi informasi sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah dalam memimpin suatu daerah, karena teknologi informasi dapat memudahkan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah mengemas serangkaian informasi penting dan melakukan berbagai macam layanan publik melalui halaman web yang diterbitkan melalui internet. Ini merupakan upaya menuju *good governance* dengan menciptakan E-Government yang berbasis web. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki pengelolaan tatanan pemerintahan di berbagai bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan publik menuju *good governance* dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menciptakan E-Government yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemanfaatan E-government oleh Pemerintahan Banyuwangi dalam menciptakan *good governance* telah tercapai karena masyarakat dapat menggali informasi penting dan dapat melakukan registrasi atau melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui E-Government.

Kata Kunci : Banyuwangi, E-Government, *Good Governance*

Abstract

In the era of all-digital globalization, information technology is very important role in supporting the government's success in leading the region. Because with information technology can facilitate government interact with society. The government packs a series of important information and performs various public services areas through web pages that are published through the internet. This is an effort toward good governance by creating Web-based E-Government. As the government of Banyuwangi District utilizes information technology to improve the management of governmental order in various fields. The purpose of this study is to analyze and describe that in improving public management to good governance can utilize information technology by creating E-Government which has been applied by the government of Banyuwangi Regency. This study uses Qualitative approach of this research is that government by creating E-government to get good governance has been reached because society can dig important information, can register or make payment easily and fast through E-Government.

Keywords: E-Government, *Good Governance*, Banyuwangi

PENDAHULUAN

Istilah *Good Government* mulai muncul dan populer di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya birokrasi pemerintahan di Indonesia yang sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan publik maksudnya birokrasi lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan publik yang kurang baik

dll.¹ Oleh karena itu menciptakan konsep *good government* menuju *Good Governance* merupakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah birokrasi pemerintahan. *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).² Untuk menciptakan *good governance* diperlukan adanya kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak antara pemerintah dan masyarakat dengan menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, professional dan etos kerja dalam melaksanakan efektifitas pelayanan publik pemerintahan.

Dengan demikian, kualitas pelayanan public akan menjadi semakin baik, angka korupsi akan semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli terhadap kepentingan masyarakat. Menurut Tascherau dan Compos dikutip Thoha dalam Ambar Teguh; Terciptanya keadaan dimana saling mengontrol satu sama lain, dari pemerintah, rakyat, usahawan baik yang berada di sector swasta maupun sector negeri dapat disebut *good government* yang baik.³ Upaya saling mengontrol pelayanan public antara masyarakat dan pemerintah mempunyai tingkat derajat yang harus seimbang agar terciptanya keselarasan pemerintahan. Pemerintah mempunyai peranan yang penting dari peralihan *good government* menuju *good governance* dengan melakukan berbagai upaya pelayanan prima untuk masyarakat. Kualitas baik atau tidaknya pelayanan prima dari pemerintah kepada rakyat dapat menentukan kesuksesan *good governance*.

Di dalam menciptakan *good government* menuju *good governance* merupakan suatu hal yang sangat sulit dan pastinya akan menemukan banyak kendala-kendala oleh karena itu di perlukan beberapa langkah strategi untuk memulai perubahan. *Good governance* mempunyai beberapa prinsip-prinsip.⁴ Salah satu prinsip yang terpenting adalah prinsip transparansi. Pelayanan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang transparansi merupakan faktor utama terpenting dalam menciptakan *good governance*. Karena pemerintah dituntut terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Penyelenggaraan pemerintah yang transparansi pada dasarnya membuka ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, terutama yang berhubungan

¹ Bambang, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra wacana Media, 2010, hlm.89

² Zaenal, Muhibudin, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government & Good Government*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 48

³ Alfred Tat-Key-Ho. 2002. *Public Administration Review*. 15 Oktober 2017. Volume 62 No.4. Iowa State University. USA

⁴ Bambang, *Manajemen Pemerintahan*. hlm.90-93

dengan *public needs*.⁵ Dengan adanya transparansi sistem pemerintahan memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi penting dengan mudah dan cermat. Karena transparansi harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen publik seperti, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan laporan hasil kinerja. Dalam UU No. 14 Tahun 2008 telah diatur tentang keterbukaan informasi public.⁶ Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menerapkan prinsip transparansi dalam berbagai kegiatan pemerintah untuk mencegah praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta terciptanya tata pemerintahan yang baik.⁷

Dalam era informasi seperti saat ini teknologi informasi internet tidaklah asing di mata masyarakat awam sekalipun, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menciptakan dan menerapkan E-Government diberbagai instansi maupun daerah. Indarjit menyebutkan bahwa, konsep E-Government bukanlah inisiatif yang mudah dan murah, sebelum memutuskan menerapkan konsep E-Government harus mengetahui latar belakang penyebab diterapkannya.⁸ Konsep E-Government ini telah diterapkan oleh pemerintah di Kabupaten Banyuwangi, untuk mempublikasikan manajemen dan kinerja pemerintahannya melalui web internet. Seluruh kegiatan di bawah pengelolaan Pemkab Banyuwangi bisa dikontrol secara efektif. Ada lebih 12.000 titik wilayah di Kabupaten Banyuwangi dikontrol melalui aplikasi *e-Government* seperti *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Monitoring*.⁹ Hal ini dilakukan pemerintah untuk mempublikasikan kinerja dan manajemen pemerintahan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi, agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan bahwa dalam peningkatan manajemen public menuju good governance dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menciptakan E-Government yang telah di terapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi dan

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*, Bandung:CV Mandar Maju.2003,hlm.2

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.(Jakarta : Sinar Grafika.2001), 322

⁷ Miftah Thoha, *Good Governance*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.1999, hlm.25

⁸ Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government*. Yogyakarta :2005,hlm 3

⁹ Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi 2012. [Http://www.Banyuwangikab.go.id](http://www.Banyuwangikab.go.id).
Akses 18 Oktober 2017

hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁰ Disini peneliti langsung menuju populasi yaitu kabupaten banyuwangi dengan menggunakan teknik analisis deduksi yakni menarik kesimpulan dimulai dengan pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan penggunaan penalaran dan rasio.¹¹ Dalam konteks ini peneliti berusaha menggali dasar-dasar secara teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang selanjutnya penulis ambil suara kesimpulan. Dan menggunakan random sampling, peneliti secara acak memilih narasumber sebagai informan kunci untuk memberikan informasi akurat yang meliputi aparatur pejabat pemerintah yang memahami implementasi E-government pada dinas instansi yang ada. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari berbagai literature, regulasi, dan referensi terkait alamat website dari masing-masing organisasi perangkat daerah (sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor) yang telah telah mempunyai website. Seperti contoh website kabupaten banyuwangi yakni : <https://www.banyuwangikab.go.id/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance

Good Governance adalah Kemauan atau komitmen untuk melaksanakan aturan main serta praktek penyelenggaraan pemerintah secara sehat dan beretika.¹² Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai agen of change (agen perubahan) dan *agen of control* (agen kontrol) segala aktifitas pelayanan publik melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan peran perancangan bahkan budget penting yang akan di terapkan dan di publikasikan kepada masyarakat.¹³ Terdapat delapan prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa suatu pemerintahan memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Prinsip *Participation*

Bahwa Warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun berdasarkan kebebasan berbicara

2. Prinsip *Rule of law*

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*(Yogyakarta: Andi Offset, 2002),

¹¹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Kerja Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998),76.

¹² Endro Sumarjo.*Aktualisasi nilai-nilai Good Governance.Makassar*.Jurnal Hukum dan Ham.2003.hlm.2

¹³ Miftah Thoha, *Good Governance*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.1999, hlm.21

¹⁴ Bambang, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta:Mitra wacana Media,2010, hlm.90-93

- Mewujudkan adanya penegak hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, dan menjunjung tinggi hukum hak asasi manusia
3. Prinsip Transparansi
Setiap proses pengambilan kebijakan public dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan.
 4. Prinsip *Responsiveness*
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Dengan cepat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Misalnya: tangap dan cepat dalam pelayanan public dari pemerintah kepada masyarakat.
 5. Prinsip *Consensus Orientation*
Perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
 6. Prinsip *Effectiveness and Efficiency*
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Efisiensi berkenaan dengan pembiayaan an efektif berkaitan dengan tercapainya sasaran yang diinginkan
 7. Prinsip *Accountability*
Bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya yakni apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi janji terhadap mandate yang yang diberikan oleh rakyat dalam konstitusi Negara. Misal : Pemenuhan janji yang telah disampaikan ketika pemerintah mencalonkan diri.
 8. Prinsip Strategi
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

E-Government

E-government, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, khususnya internet, untuk memberikan layanan public berupa informasi dengan cara yang lebih mudah, berorientasi pelanggan, hemat biaya, dan semua cara yang berbeda.¹⁵ Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah paling luas di pulau Jawa dengan luas wilayah 5.782,50 km², karakteristik yang dimiliki oleh kabupaten ini adalah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang baik dengan didukung oleh sarana pendidikan, industri, pariwisata dan system pemerintahan yang stabil. Hal ini menjadi modal untuk mengembangkan pelayanan publik kearah yang lebih baik. Pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mulai dibangun dengan menerapkan teknologi informasi seperti E-

¹⁵ McLeod, Raymond Jr. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : PT. Indeks. 200. hlm 15

Government pada bidang administrasi, kearsipan dengan sasaran desa dan kecamatan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penyelenggara pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menuju good governance yang baik dan tepat. Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyediaan data, informasi pengetahuan, maupun kebijakan yang diikuti dengan disebarkannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, inilah yang mendasari bahwa teknologi yang paling tepat untuk diterapkan pada sistem pelayanan publik adalah teknologi Internet.¹⁶ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan terobosan dengan menghasilkan suatu program inovasi daerah yang bertemakan Banyuwangi Digital Society.¹⁷ Hal ini diawali dengan program penyebaran internet melalui pembangunan infrastruktur wifi.id dengan harapan memberi kemudahan akses internet bagi masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan, agama, pendidikan, perpajakan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat ketersediaan akses internet. Pemerintah banyuwangi telah menyediakan jaringan 1.250 titik wifi yang sudah disehatkan dan difilter dari konten pornografi di area publik seperti RTH (Ruang Terbuka Hijau), mall, kampus, sekolah, hotel dan restoran, yang diharapkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak kesempatan untuk melakukan akses dengan mudah dan murah.

Dengan adanya fasilitas ini pemerintah kabupaten banyuwangi menerapkan E-Government untuk dapat mengakses dan mempublikasikan kinerja pemerintahannya kepada masyarakat luas. Dan hasilnya adalah good government sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan dengan adanya pemanfaatan E-Government dengan memberlakukan salah satu prinsip dari Government yakni transparansi telah tercapai. Sehingga terhindar dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).¹⁸ Dalam gambar (2.1-2.4) adalah contoh bukti bahwasanya pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan tranparansi menggunakan E-Governmen sehingga memudahkan masyarakat mengetahui informasi penting dan kinerja dari aparat pemerintah.

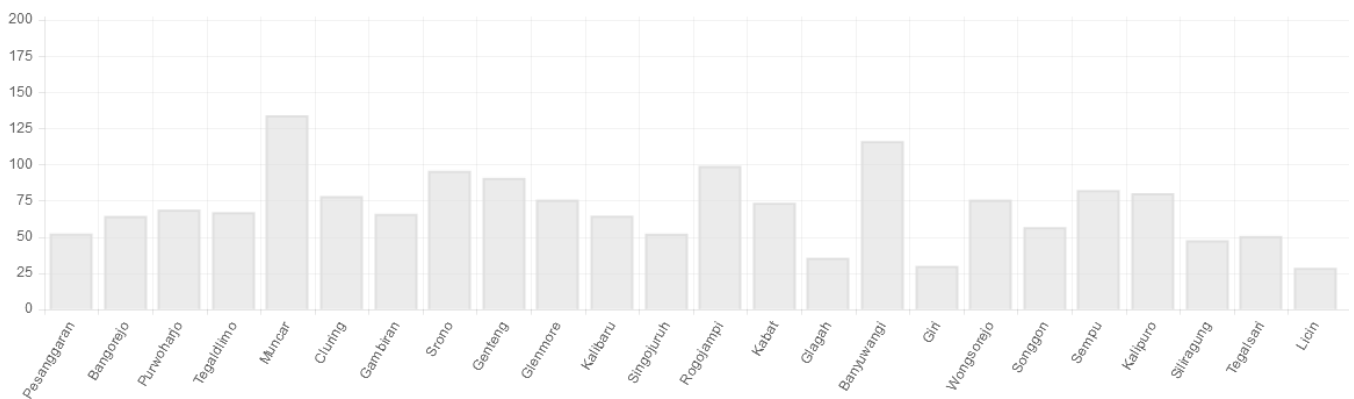
¹⁶ Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government*. Yogyakarta :2005, hlm 6

¹⁷ Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi 2012. [Http://www.Banyuwangikab.go.id](http://www.Banyuwangikab.go.id). Akses 18 Oktober 2017

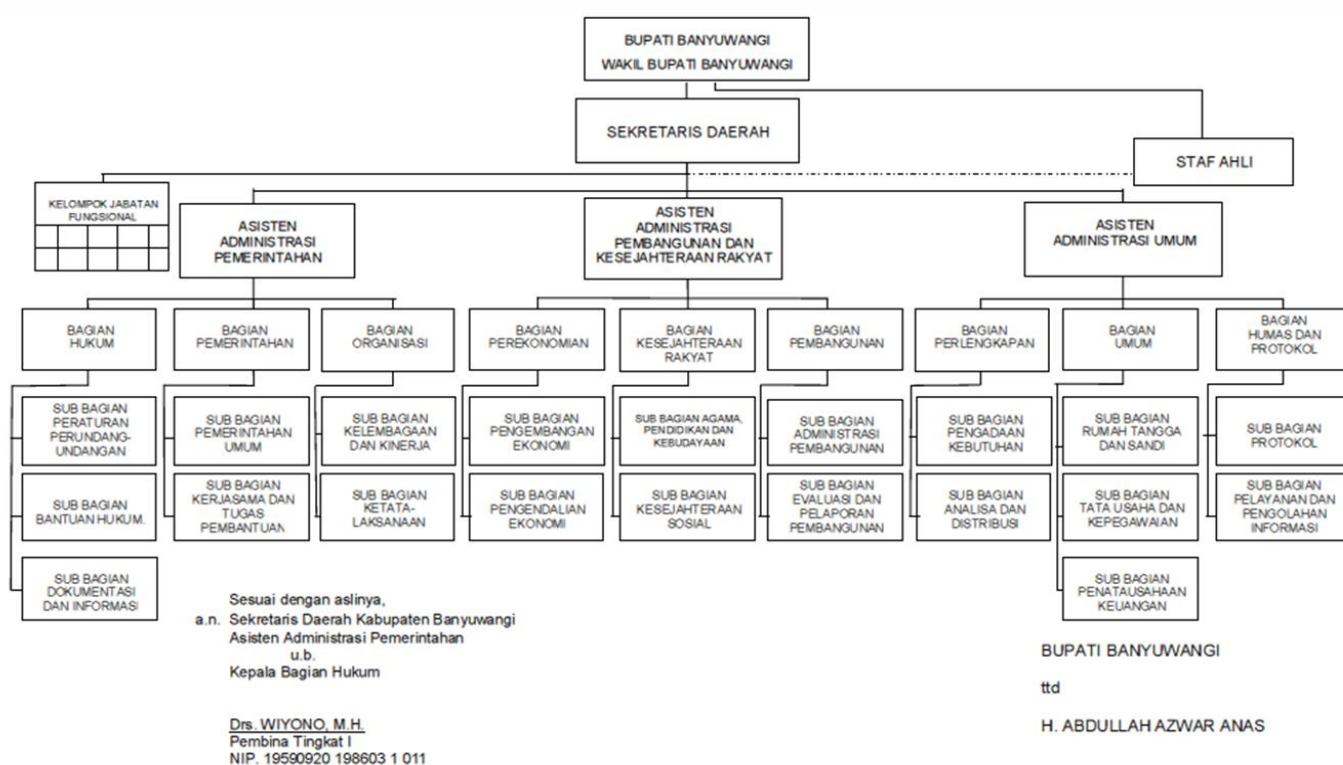
¹⁸ Zaenal, Muhibudin, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government & Good Government*, Bandung:Pustaka Setia,2000, hlm. 48



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi
 Sumber : *Banyuwangi Dalam Angka 2007-2011*



Gambar 2.2. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
 Sumber : *Banyuwangi Dalam Angka 2007-2011*



Gambar 2.3. Struktur Birokrasi Kabupaten Banyuwangi
Sumber : *Banyuwangi Dalam Angka 2007-2011*

Tabel 2.1: Ringkasan Realisasi APBD 5 tahun terakhir 2007-2001

No	Anggaran	2006	2007	2008	2009	2010
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53.725.937.573,73	61.103.267.230,61	73.970.832.546,54	86.977.565.944,72	87.307.973.996,32
2	Dana Perimbangan (Transfer)	752.7-198.352.345,33	854.884.783.866,00	940.565.487.465,00	1.036.440.536.941,85	927.297.552.851,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	8.751.746.930,00	5.823.152.486,32	20.274.187.103,34	190.910.507.025,00
	Jumlah Pendapatan	805.924.289.919,06	924.739.798.029,61	1.020.359.472.497,86	1.143.692.289.989,91	1.205.516.033.872,32
B	Belanja					

1	Belanja Tidak Langsung	597.016.101.724,77	696.233.079.535,29	761.970.838.874,40	870.984.822.619,83	1.077.830.287.210,46
2	Belanja Langsung	84.269.684.460,13	235.817.425.031,80	162.198.857.572,45	299.763.852.129,67	142.134.599.790,96
	Jumlah Belanja	681.285.786.184,90	932.050.504.567,09	924.169.696.446,85	1.170.748.674.749,50	1.219.964.887.001,42
	Surplus/Defisit Anggaran	124.638.503.734,16	(7.705.978.540,48)	96.189.776.051,01	(27.056.384.759,59)	(14.448.853.139,10)

Sumber : *Banyuwangi Dalam Angka 2007-2011*

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi menjalankan strategi dalam meningkatkan manajemen public dengan memanfaatkan teknologi Informasi seperti menciptakan aplikasi yang disebut E-Government untuk mewujudkan system pemerintah birokrasi Good Governance telah tercapai atau sukses. Hal ini terbukti dari infrastruktur informasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan memasang 1.250 titik wifi di seluruh wilayah Banyuwangi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggali informasi seputar birokrasi pemerintahan secara gratis cepat dan tepat. Dan bertujuan agar supaya pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terhindar dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Tat-Key-Ho. 2002. Public Administration Review. 15 Oktober 2017. Volume 62 No.4. Iowa State University. USA
- Bambang. 2010. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra wacana Media,
- Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi 2012. [Http://www.Banyuwangikab.go.id](http://www.Banyuwangikab.go.id). Akses 18 Oktober 2017
- Febriah. Rizkah, Pengembangan *e-government* pada Layanan Informasi Publik Pemerintahan Daerah sulawesi barat menuju *Good governance*. [Http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/](http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/) Akses 18 Oktober 2017
- Muhibudin, Zaenal.2000 *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government & Good Government*, Bandung:Pustaka Setia,
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Kerja Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998
- Richard, Elisabeth. 1999. “*Tools of Governance*”, dalam Barry N. Hague and Brian D. Loader, ed, *Digital Democracy : Discourse and Decision Making in the information Age*. London : Routledge

Sedarmayanti.2003. *Good Governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*, Bandung:CV Mandar Maju.

Sumarjo, Endro.2003 *Aktualisasi nilai-nilai Good Governance.Makassar*. Jurnal Hukum dan Ham

Sutrisno Hadi, 2002 *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset.)

Thoha, Miftah .1999.*Good Governance*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

The World Bank, The Dark Side of E-Government, <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/darksideofe-gov.pdf>,2003, Akses 14 Oktober 2017

Wibisono,Y Sulistyaningsih, 2002, The Development of E-government in Indonesia, <http://www.uncrd.or.jp/ict/eworkspace/papers/dpwo.ro.htm>, Akses 11 Oktober 2017